

Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Pesisir Tanjungpinang

Stevy Indah Pratama

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Muhammad Randianto

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Aswandi

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29115

Abstract: *In terms of public welfare, the Republic of Indonesia makes many policies, especially on road infrastructure development policies. One of the policies is the coastal ring road infrastructure development policy contained in the Strategic Plan (RENSTRA) of the Office of Public Works, Spatial Planning and Land Affairs, which aims to improve the implementation of effective, clean and reliable infrastructure development and is supported by qualified human resources. high performance. Not only that, infrastructure development is a strategy from the government to serve as a foundation in building new economic areas that are able to have a positive impact on the surrounding community. In 2018 the Provincial Government of the Riau Islands together with the Provincial DPRD officially claimed a budget of 428 billion in the construction of the Gurindam 12 mega project for structuring coastal areas which sourced funds from the Riau Islands Province APBD. Coastal communities really need functioning infrastructure, especially roads, to carry out their economic activities. The seaside is one of the coastal areas that has a lot of economic activity which really needs adequate infrastructure. Because of the several things above, researchers are interested in researching problems related to this. The purpose of this research is to see how policy implementation measures the success or failure of a policy is largely determined by the implementation of the policy; plan success 20%, implementation is 60% remaining 20% how do we control the implementation using qualitative research methods. The construction of ring road infrastructure in the city of Tanjungpinang which was built by the government has positive and negative impacts. The positive impact of this development can limit the flow of waves and wind when a storm occurs, while the negative impact is reduced catch (shrimp) which previously could be 4 kg per day/night now only 2 kg per day/night.*

Keywords: *Implementation, policy, public policy*

Abstrak: Dalam kesejahteraan masyarakat, negara republik Indonesia membuat banyak kebijakan, khususnya pada kebijakan pembangunan infrastruktur jalan. Salah satu kebijakannya yaitu, kebijakan pembangunan infrastruktur jalan lingkar pesisir yang terdapat pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang mana tujuan ini untuk meningkatkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkinerja tinggi. Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur merupakan strategi dari pemerintah untuk dijadikan sebagai pondasi dalam membangun kawasan ekonomi baru yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama DPRD Provinsi dengan resmi mengklaim anggaran sebesar 428 miliar dalam pembangunan mega proyek gurindam 12 untuk penataan kawasan pesisir pantai yang sumber dana dari APBD Provinsi Kepulauan Riau. Masyarakat pesisir sangat membutuhkan infrastruktur yang berfungsi, terutama jalan, untuk menjalankan aktivitas ekonominya. Tepi laut merupakan salah satu wilayah pesisir yang banyak memiliki kegiatan ekonomi yang mana sangat membutuhkan infrastruktur yang memadai. Oleh karena beberapa hal di atas peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan terkait hal tersebut. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan, mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh implementasinya kebijakan; rencana sukses 20%, implementasi adalah 60% sisa 20% bagaimana kita mengontrol pelaksanaannya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu Pembangunan Infrastruktur jalan lingkar di kota Tanjungpinang yang di bangun oleh pemerintah memiliki dampak yang positif dan negatif. Dampak positif dari pembangunan tersebut dapat membatasi arus gelombang dan angin ketika terjadi badai sementara itu dampak negatifnya hasil tangkap (udang) berkurang yang sebelumnya bisa 4kg per satu hari/malam sekarang hanya 2kg per satu hari/malam

Kata kunci: Implementasi, kebijakan, kebijakan publik

LATAR BELAKANG

Tujuan negara tertuang pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat empat tujuan yang ada pada Undang-Undang 1945 diantaranya melindungi segenap bangsa dengan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial.

Dalam kesejahteraan masyarakat, negara republik Indonesia membuat banyak kebijakan, khususnya pada kebijakan pembangunan infrastruktur jalan. Salah satu kebijakannya yaitu, kebijakan pembangunan infrastruktur jalan lingkar pesisir yang terdapat pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang mana tujuan ini untuk meningkatkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkinerja tinggi. Peran jalan dalam pembangunan nasional dan daerah termasuk infrastruktur transportasi. Alat pertumbuhan ekonomi dan alat pertahanan dan keamanan. Kualitas infrastruktur jalan. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di sektor jalan. Bentuk ini bisa menjadi bentuk jalan lingkar di berbagai kota di Indonesia. Tugas utama jalan lingkar adalah mengurangi kemacetan pada jalur umum lalu lintas jalan raya sebagai sarana dan prasarana bersama. Meningkatnya pembangunan jalan akan memudahkan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur merupakan strategi dari pemerintah untuk dijadikan sebagai pondasi dalam membangun kawasan ekonomi baru yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama DPRD Provinsi dengan resmi mengklaim anggaran sebesar 428 miliar dalam pembangunan mega proyek gurindam 12 untuk penataan kawasan pesisir pantai yang sumber dana dari APBD Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah provinsi Kepulauan Riau khususnya di Tanjungpinang telah merealisasikan program pembangunan infrastruktur jalan lingkar pesisir. Keputusan gubernur Kepulauan Riau nomor 291 tahun 2022 tentang daftar kegiatan strategis daerah provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2022 pada dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan provinsi Kepulauan Riau terdapat pembangunan jalan lingkar pesisir kota Tanjungpinang (lanjutan). Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan jalan provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang. Jalan raya negara adalah jalan penghubung dalam sistem jaringan jalan utama yang menghubungkan ibu kota negara bagian dengan ibu kota kabupaten/kota yang menjadi jalan penghubung utama². Jalan kolektif dalam sistem jaringan jalan utama yang menghubungkan ibu kota dengan kabupaten/kota yang merupakan jalan pengumpul utama; 3; jalan negara

Posisi strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai modal dasar pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil, dan demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat

Infrastruktur adalah macam-macam fasilitas fisik yang dikembangkan dan dibutuhkan oleh berbagai agen publik untuk fungsi pemerintahan. Pembangunan infrastruktur sebuah kota akan mempengaruhi pola pergerakan masyarakat, oleh karena itu apabila peningkatan pergerakan masyarakat tanpa adanya pengimbangan dengan peningkatan kualitas prasarana maka akan mengakibatkan ketimpangan antara permintaan dan juga pergerakan berupa ketidakseimbangan antara permintaan dan juga pergerakan sehingga infrastruktur menjadi faktor utama penyebab permasalahan tersebut.

Masyarakat pesisir adalah kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir yang mata pencaharian ekonominya secara langsung bergantung pada pengembangan sumber daya laut dan pesisir. Masyarakat pesisir sangat membutuhkan infrastruktur yang berfungsi, terutama jalan, untuk menjalankan aktivitas ekonominya. Tepi laut merupakan salah satu wilayah pesisir yang banyak memiliki kegiatan ekonomi yang mana sangat membutuhkan infrastruktur yang memadai. Oleh karena beberapa hal diatas peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan terkait hal tersebut. Karena itu kami melakukan penelitian ini dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR (Studi kasus jalan lingkaran Tanjungpinang kepulauan riau) “.

KAJIAN TEORITIS

Literature research atau penelitian kepustakaan adalah kegiatan menelaah atau menelaah berbagai literatur yang diterbitkan oleh para sarjana dan peneliti lain yang sebelumnya ada kaitannya dengan topik yang diteliti. Dalam banyak proses penelitian, sebelum, selama, atau setelah melakukan penelitian, peneliti biasanya diminta untuk memberikan tinjauan literatur umum sebagai bagian dari pengenalan proposal penelitian atau laporan penelitian. Mempersiapkan tinjauan literatur sama dengan meringkas hasil penelitian sebelumnya untuk memberikan gambaran tentang topik atau masalah yang diteliti dan untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul ketika penelitian dimulai.

1. Pada skripsi penelitian dengan judul kebijakan pemerintah kota salatiga terhadap Keberadaan pasar tiban di jalan lingkaran salatiga yang dilakukan oleh Renaldi Tio Anggada, 2017, mendapati bahwa skripsi penelitian ini membahas kebijakan Pemerintah Kota Salatiga dalam menangani Pasar Tiban di Jalan Lingkaran Salatiga yang telah

menimbulkan dampak negatif pada lingkungan sekitarnya. Pemerintah telah membentuk Asosiasi Pasar Tiban sebagai mediator antara pedagang kaki lima dan pemerintah setempat untuk menjaga keberadaan pasar sambil memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Teori kebijakan publik, kewenangan pemerintah daerah, diskresi, dan ketentuan PERDA di Kota Salatiga yang berkaitan dengan penataan. Menjelaskan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Salatiga Arah dari jurnal ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan Pemerintah Kota Salatiga dalam menangani Pasar Tiban di Jalan Lingkar Salatiga.

2. Pada penelitian dengan judul implementasi kebijakan pembangunan Jalan Lingkar di Kabupaten Tuban, Jurnal ini membahas tentang implementasi kebijakan pembangunan Jalan Lingkar di Kabupaten Tuban, Indonesia, dan tantangan yang dihadapi dalam prosesnya. Jurnal ini juga membahas tentang pentingnya pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya pembangunan Jalan Lingkar di Tuban, dan dampak positifnya terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti pentingnya komunikasi dan konsultasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi kekhawatiran yang muncul dari beberapa warga setempat yang merasa bahwa lahan produktif dan rumah mereka akan terkena dampak dari pembangunan Jalan Lingkar. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik, yang membahas tentang bagaimana kebijakan publik diimplementasikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, kemungkinan juga digunakan teori pembangunan infrastruktur dan teori komunikasi publik, yang membahas tentang pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur. Jurnal tersebut menyebutkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pembangunan Jalan Lingkar adalah kurangnya sumber daya keuangan. Selain itu, dalam berita yang dilansir dari suarabanyuurip.com, disebutkan bahwa pembangunan Jalan Lingkar Selatan harus bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban karena gagalnya proses lobi untuk memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menunjukkan bahwa masalah keuangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan Jalan Lingkar di Kabupaten Tuban.
3. Pada penelitian ini dengan judul politik ekonomi dalam pembangunan jalur lingkar luar barat kota surabaya, dengan penulis Escha islami anwar, tahun 2008. Jurnal ini membahas tentang motif ekonomi politik di balik pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) di Kota Surabaya, Indonesia. jurnal ini menjelaskan bagaimana pemerintah kota Surabaya

menggunakan fungsi perencanaannya untuk mengelola surplus modal dan tenaga kerja, dan bagaimana pembangunan infrastruktur JLLB dianggap sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru kota Surabaya. Ini juga membahas konsep spatio-temporal fixes dalam konteks pembangunan jalan JLLB, serta hubungan kekuasaan antara pengembang dan pemerintah dalam alokasi dana untuk proyek tersebut. Teori yang digunakan untuk membahas motif ekonomi politik di balik pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) di Kota Surabaya, Indonesia. Beberapa teori yang digunakan antara lain: Konsep spatio-temporal fixes, Teori mesin pertumbuhan ekonomi, Teori politik ekonomi, Teori konflik, kontestasi, dan negosiasi.

4. Pada penelitian ini dengan judul Dampak rencana pembangunan jalan lingkar timur perkotaan kabupaten karawang terhadap kinerja lalu lintas, yang dilakukan oleh Rinondyo Damar Pangestu, Dani Hardianto, M.SC, dan IR, Tonny C.M Korah, MSI. Jurnal ini membahas tentang berbagai studi kelayakan dan analisis terkait transportasi dan jalan lingkar di beberapa kota di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja jalan dan transportasi serta memberikan alternatif kebijakan dan rekomendasi pembangunan jalan lingkar untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi transportasi di kota-kota tersebut. Jurnal ini menggunakan berbagai teori dan konsep terkait transportasi, seperti dasar-dasar rekayasa transportasi, manajemen transportasi, perencanaan dan pemodelan transportasi, dan lain-lain. Ini lebih fokus pada studi kelayakan dan analisis terkait transportasi dan jalan lingkar di beberapa kota di Indonesia, serta memberikan alternatif kebijakan dan rekomendasi pembangunan jalan lingkar untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi transportasi di kota-kota tersebut. Namun, beberapa kebijakan terkait transportasi dan jalan lingkar di Indonesia disebutkan dalam dokumen ini, seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan lain-lain
5. Pada penelitian ini dengan judul Pengaruh Pembangunan Jalan Lingkar Luar Petuk Terhadap Perubahan Fungsi Kawasan Dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kota Kupang, yang dilakukan oleh Muh Widodo, pada tahun 2023. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisis dampak pembangunan jalur lingkar luar petuk terhadap kondisi sosial ekonomi dan tata guna lahan di tiga kelurahan dan satu desa yang terkena dampak pembangunan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui dampak pembangunan jalur lingkar luar petuk terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan peluang usaha di daerah tersebut.

Dalam penelitian ini, digunakan teori regresi linear untuk mengetahui hubungan antara pembangunan jalur lingkaran luar petuk dengan peningkatan harga jual tanah dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Dampak ekonomi dari pembangunan jalur lingkaran luar petuk dijelaskan dalam dokumen tersebut antara lain meningkatkan ketersediaan barang kebutuhan, mempermudah distribusi dan pemasaran barang, meningkatkan aktivitas dan mendukung kelancaran ekonomi, meningkatkan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan produktivitas kerja serta jenis pekerjaan yang dilakukan semakin membaik. Selain itu, penelitian juga menunjukkan adanya hubungan positif antara perubahan tingkat pendapatan dan perubahan luas lahan, yang dapat diartikan bahwa semakin besar pendapatan masyarakat maka semakin besar pula perubahan luas lahan yang terjadi.

6. Pada penelitian dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Penataan Kawasan Pesisir Pantai Gurindam 12 yang dilakukan oleh Alfi Husni, Rianto, dan Anggi Dwidhika pada tahun 2022. Persepsi adalah proses mengumpulkan, memahami, dan menafsirkan informasi untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pendapat tentang pengelolaan dan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kualitas hidup. Diinformasikan dalam penelitian ini Ada persepsi positif dan negatif dari masyarakat.

Implementasi

"Implementasi" berarti "mengimplementasikan" dalam bahasa Inggris. Implementasi adalah tentang menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang mempengaruhi atau memengaruhi sesuatu. Segala sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan pengaruh dan hasil dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan arahan dari instansi pemerintah dalam kehidupan masyarakat.

George C. Edward III (Leo Agustino 2008:194) menyatakan bahwa "Implementasi kebijakan memiliki aspek penting dalam mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang dapat dilihat dari aspek:

1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu. Individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu

2. Sumber Daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

3. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan” .

METODE PENELITIAN

Menurut Creswell (2008), Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan atau investigasi untuk mempelajari dan memahami peristiwa sentral. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena sentral, peneliti melakukan wawancara dengan peserta penelitian atau relawan dan mengajukan pertanyaan umum dan relatif luas. Informasi diatur ke dalam kata-kata atau teks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai suatu proses, suatu kebijakan publik yang disetujui tidak ada gunanya jika tidak dilaksanakan, karena implementasi kebijakan publik masih bertujuan untuk mewujudkan kebijakan publik yang sifatnya abstrak. Artinya, implementasi kebijakan publik ditujukan untuk mencapai hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa tahapan

perencanaan dan perumusan kebijakan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, namun pada akhirnya ekspektasi produk kebijakan akan menjadi kurang jika tidak diperhatikan optimalisasi pelaksanaan pada tahapan implementasi tidak akan terlaksana. Sudah diputuskan. Tahap evaluasi kebijakan mengidentifikasi inkonsistensi dalam pengembangan dan implementasi kebijakan dan implementasi kebijakan tidak sesuai dengan harapan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pembangunan infrastruktur penataan di Kawasan pesisir Pantai Gurindam 12 Kota Tanjungpinang, dengan anggaran ataupun alokasi dana proyek 2018 tahap pertamanya mencapai Rp.95.374.000.000 yang didanai oleh APBD Tahun 2018. Menurut Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, mengatakan bahwa Kepulauan Riau adalah sebagai daerah kepulauan yang memerlukan kelengkapan infrastruktur yang memadai. Pemerintah Kepri berencana membangun jalan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi dan meningkatkan investasi yaitu jalan lingkar, dan menjadi simbol baru ibukota provinsi Kepri. Proyek pembangunan jalan lingkar mega sepanjang 42 kilometer dan mengelilingi kota Tanjung Pinang dan Bintan. Pelaksanaan proyek kegiatan ini dilakukan di Kawasan tepi laut yaitu di depan SMAN 5 Tanjungpinang hingga mencapai Kawasan Lantamal IV kurang lebih mencapai 4.82 Kilometer, diukur dari Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura (SBP) hingga mencapai jembatan I Dompok yang dilaksanakan dengan system pola pembiayaan multiyears dari APBD Kepulauan Riau selama lebih kurang 3 tahun yaitu dari 2018-2020. Untuk tahap pertama dilakukan dengan anggaran APBD mencapai Rp.95,3 miliar .

Pada tanggal 8 Desember 2020 Gubernur Kepri yaitu Isdianto dan Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah beserta Organisasi Perangkat Daerah meninjau sejauh mana tahap pengerjaan infrastruktur pembangunan jalan lingkar Gurindam 12 di Tepi Laut Tanjungpinang. Pembangunan ini akan ditambah dengan pembangunan kios-kios termasuk untuk pejalan kaki. Pengelolaan lingkungan jalan lingkar dalam upaya dibuat seindah mungkin agar menimbulkan daya tarik. Pembangunan selanjutnya akan dilanjutkan pada tahun 2021 oleh Pemprov dengan anggaran mencapai sebesar Rp. 30 miliar, dana ini untuk melanjutkan proses pembangunan dan juga untuk memantapkan jalanan yang masih belum maksimal contohnya pengerjaan taman, landscape dan lain sebagainya. Jalan lingkar bisa digunakan pada tanggal 29 Desember 2021, dan nantinya jalur pintu masuk dibuat dengan dua arah jalur pertama di depan Gedung Derah dan jalur kedua yaitu di depan Lantamal IV.

Implementasi kebijakan mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh implementasinya kebijakan; rencana sukses 20%, implementasi adalah 60% sisa 20% bagaimana kita mengontrol pelaksanaannya. Atas dasar itu, menurut Edward III, penulis membatasi aspek-aspek yang akan diuji pada aspek-aspek komunikasi, sumber daya,

temperamen, dan struktur birokrasi untuk keberhasilan implementasi, yang masing-masing disebut sebagai “Tanjung Pinang”. Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar”.

Pada penelitian ini dengan judul persepsi masyarakat terhadap pembangunan jalan lingkar utara kota Solok, dengan penulis Roni Oktora, tahun 2011. Dalam makalah tentang dampak pembangunan jalan lingkar terhadap perkembangan wilayah ini, 67% responden menyatakan bahwa pembangunan jalan lingkar akan mengembangkan kawasan utara kota Solok. Sebanyak 60% responden menyatakan bahwa pembangunan jalan lingkar akan memicu pembangunan banyak gedung baru dan 47% responden berpendapat bahwa pembangunan jalan lingkar akan berdampak pada peningkatan konektivitas dengan kawasan sekitar. Manfaat lalu lintas dari jalan lingkar. Masyarakat berharap pembangunan tersebut akan meningkatkan akses ke daerah sekitar sebesar 64%, mempercepat transportasi kendaraan sebesar 57%, mengurangi waktu tempuh dan biaya bahan bakar sebesar 45%, serta mengurangi kemacetan perkotaan sebesar 44%. Melihat manfaat transportasi dari pembangunan Jalan Lingkar Utara di Kota Solok yang sudah sangat baik, jalan tersebut perlu dilestarikan dan diatur perkembangannya

Pada penelitian ini dengan judul analisa manfaat ekonomi dan lalu lintas terhadap pembangunan jalan lingkar luar kota Palu, dengan penulis Cerdasir Mestika dkk, tahun 2019. Jurnal ini mencermati pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Palu (JLLKP) yang bertujuan untuk mengurai kemacetan akibat bercampurnya seluruh lalu lintas darat dari dua pintu masuk dan keluar Kota Palu pada jalur perjalanan yang sama. Studi ini menganalisis bagaimana pembangunan Jalan Lingkar Luar akan mempengaruhi pengurangan lalu lintas pada beberapa jalan yang terhubung langsung dan penghematan biaya bagi pengguna jalan (PBPI), berdasarkan perkiraan biaya ekonomi proyek. harga. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian. Analisis lalu lintas menunjukkan penurunan yang signifikan dalam volume lalu lintas dan saturasi lalu lintas di keempat jalan yang diteliti. Dari analisis ekonomi, ketika $NPV = 0$, IRR adalah 16,5%, yang berarti investasi yang diadopsi layak.

Pada penelitian ini dengan judul pengaruh jalan lingkar pantai teluk Palu terhadap peningkatan pendapatan masyarakat kelurahan Lere, dengan penulis Asnah Abu, tahun 2012. Jurnal tersebut berpendapat bahwa kepadatan lalu lintas perkotaan pasti menyebabkan kemacetan, yang dapat menyebabkan tingginya biaya transportasi dan perjalanan serta meningkatkan polusi udara hingga ambang batas. Kondisi ini mempengaruhi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jaringan alternatif disediakan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas kendaraan dan mencapai kapasitas jaringan yang direncanakan. Pembangunan infrastruktur transportasi sangat erat kaitannya dengan tingkat pendapatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan berapa peningkatan pendapatan

masyarakat desa Lele setelah 5 tahun beroperasinya JLPTP. Metode yang digunakan adalah metode wawancara dan alat survei berupa kuesioner yang dibagikan kepada 85 responden yang berdomisili di sepanjang jalur 1,82 km. Untuk mengetahui tingkat pendapatan responden sebelum dan sesudah adanya JLPTP, data dianalisis dengan metode tabulasi silang dan hipotesis diuji dengan uji-t sampel berpasangan. Hasilnya, terlihat bahwa pendapatan masyarakat meningkat sebesar rupiah. 307.940,- atau 33,82% dari Rp 979.710,- menjadi Rp 1.287. 650 - setelah adanya Jalan Lingkar Pantai Teluk Palu.

Pada penelitian ini dengan judul analisa manfaat ekonomi pembangunan jalan lingkar Majalaya di CBD Majalaya, dengan penulis Rohmatul Bulgis, Cahya Buana, tahun 2020. Majalah ini memaparkan sebuah kabupaten dimana Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang sedang berkembang dan dimana industri berperan sangat penting dalam perekonomian Kabupaten Bandung. Industri ini bergerak di bidang tekstil, bahan makanan, dll. dan memiliki perjalanan darat di seluruh Indonesia, yang nantinya akan mempengaruhi kebutuhan akan sambungan jalan. Hal ini akan berdampak pada sektor ekonomi. Akibat tata guna lahan dan distribusi ekonomi yang tidak merata, menurut Rencana Pembangunan Daerah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036, Pemerintah Kabupaten Bandung berencana membangun Jalan Lingkar Majaraya di Kabupaten Bandung. Jalan akses yang menghubungkan ke Ring Road adalah Jalan Raswi di kecamatan Majaraya. Jalan Raswi merupakan jalan akses yang menghubungkan wilayah utara dan selatan kabupaten Bandung dan sangat padat akibat lalu lintas yang padat dan kemacetan yang parah di sisi jalan. Oleh karena itu, pembangunan Jalan Lingkar Majayaya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menggunakan model empat langkah. Selain itu dilakukan juga analisis kinerja ruas dan analisis kinerja simpang, analisis dilakukan dengan menggunakan data primer yang berasal dari lapangan dan data sekunder yang didapatkan dari instansi terkait, jurnal maupun penelitian terdahulu yang menjadi pedoman sebagai pemecahan masalah di lokasi studi.

Tahap pembebanan mengkaji aspek teknis kinerja jaringan jalan Kabupaten Bandung seperti tundaan rata-rata, waktu tempuh rata-rata, jarak tempuh rata-rata, dan kecepatan rata-rata. Setelah evaluasi kinerja jaringan dilakukan analisis nilai waktu, analisis biaya operasi kendaraan dan analisis kelayakan ekonomi. Metode Produk Domestik Bruto Tahunan digunakan untuk analisis nilai wajar. Metodologi PCI digunakan untuk menganalisis biaya operasi kendaraan. Analisis kelayakan ekonomi pembangunan jalan dihitung dengan mempertimbangkan nilai modal, tingkat pengembalian internal dan rasio biaya manfaat. Analisis harga saat ini menunjukkan penghematan rata-rata 21%. Analisis biaya operasional

kendaraan menghasilkan pengurangan biaya sebesar 20%, analisis kelayakan proyek menghasilkan NPV sebesar Rp 100.474.785.307, IRR sebesar 27,17% dan BCR sebesar 1,94.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi kebijakan publik sangat penting untuk mencapai hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Evaluasi kebijakan penting untuk mengidentifikasi inkonsistensi dalam pengembangan dan implementasi kebijakan. Pembangunan infrastruktur jalan lingkar di Kota Tanjungpinang dan Palu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan memperbaiki konektivitas. Tujuan pembangunan jalan lingkar di Solok dan Majalaya berhasil meningkatkan kegiatan ekonomi dan mengurangi kepadatan lalu lintas. Adapun Saran yang dapat diberikan yaitu, Perhatikan optimalisasi pelaksanaan kebijakan publik untuk menghindari ketidaksesuaian antara harapan dan implementasi. Lanjutkan dan perkuat pembangunan infrastruktur jalan lingkar di Kota Tanjungpinang, Palu, Solok, dan Majalaya sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Selalu lakukan evaluasi terhadap kinerja jalan lingkar yang telah dibangun untuk memperbaiki masalah yang ada dan memastikan keberlanjutannya. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pemantauan implementasi kebijakan publik dan pembangunan infrastruktur untuk memastikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang terlibat.

DAFTAR REFERENSI

- Damar, Rinondyo. n.d. "Kinerja Lalu-Lintas."
- Hasibuan, Syahrial, Iesyah Rodliyah, Sitti Zuhaerah Thalhah, Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, dan Andi Aris Mattunruang S. E. n.d. Tahta Media Group.
- Mahanum, Mahanum. 2021. "Tinjauan Kepustakaan." *ALACRITY : Journal of Education* 1(2):1–12. doi: 10.52121/alacrity.v1i2.20.
- Nofriandi, Reza. 2017. "Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/I/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-Disiplin) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa." Universitas Medan Area 9–44.
- Perpres. 2022. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan." Pemerintah Indonesia (134229):77.
- Riyadi, Sayed Fauzan, Muzwardi Ady, dan Eki Darmawan. 2021. "Tata Kelola Pelabuhan di Indonesia: Studi Kota Tanjungpinang." *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 6(01):17–25. doi: 10.31629/kemudi.v6i01.3361.
- Sebagai, Diajukan, Syarat Untuk, Mencapai Gelar, Sarjana Hukum, Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen, Satya Wacana, dan Renaldi Tio Anggada. 2017. "JANUARI 2017."

- Sonda, Juliana, Burhanuddin Kiyai, dan Helly Kolondam. 2020. "Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa." *Jurnal Administrasi Publik* 4(62):72–82.
- Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, Riski Sulistiarini, Hille Haker, Robert Piercey, dan 2018. محمد ابن زكرياى رازى. "濟無No Title No Title No Title." *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur* 27(3):259–80.
- Widodo, Muh. 2022. "Pengaruh Pembangunan Jalan Lingkar Luar Petuk Terhadap Perubahan Fungsi Kawasan Dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kota Kupang." *Bumi Lestari Journal of Environment* 23(1):6. doi: 10.24843/blje.2023.v23.i01.p02.
- Yaw, Aril La. 2008. "Konsep Dasar Kebijakan Publik." *Atmospheric Environment* 42(13):2934–47.
- Alfi Husni, R. R. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Penataan Kawasan Pesisir Pantai Gurindam 12. *Jurnal Pendidikan*.
- Damar, Rinondyo. n.d. "Kinerja Lalu-Lintas."
- Hasibuan, Syahrial, Iesyah Rodliyah, Sitti Zuhaerah Thalbah, Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, dan Andi Aris Mattunruang S. E. n.d. Tahta Media Group.
- Mahanum, Mahanum. 2021. "Tinjauan Kepustakaan." *ALACRITY : Journal of Education* 1(2):1–12. doi: 10.52121/alacrity.v1i2.20.
- Nofriandi, Reza. 2017. "Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/I/1/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-Disiplin) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa." *Universitas Medan Area* 9–44.
- Perpres. 2022. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan." *Pemerintah Indonesia* (134229):77.
- Riyadi, Sayed Fauzan, Muzwardi Ady, dan Eki Darmawan. 2021. "Tata Kelola Pelabuhan di Indonesia: Studi Kota Tanjungpinang." *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 6(01):17–25. doi: 10.31629/kemudi.v6i01.3361.
- Sebagai, Diajukan, Syarat Untuk, Mencapai Gelar, Sarjana Hukum, Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen, Satya Wacana, dan Renaldi Tio Anggada. 2017. "JANUARI 2017."
- Sonda, Juliana, Burhanuddin Kiyai, dan Helly Kolondam. 2020. "Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa." *Jurnal Administrasi Publik* 4(62):72–82.
- Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, Riski Sulistiarini, Hille Haker, Robert Piercey, dan 2018. محمد ابن زكرياى رازى. "濟無No Title No Title No Title." *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur* 27(3):259–80.
- Widodo, Muh. 2022. "Pengaruh Pembangunan Jalan Lingkar Luar Petuk Terhadap Perubahan Fungsi Kawasan Dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kota Kupang." *Bumi Lestari Journal of Environment* 23(1):6. doi: 10.24843/blje.2023.v23.i01.p02.
- Yaw, Aril La. 2008. "Konsep Dasar Kebijakan Publik." *Atmospheric Environment* 42(13):2934–47.